

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH No 07 TAHUN 2012 KABUPATEN BOJONEGORO  
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BOJONEGORO (Studi Kasus  
Penanggulangan Bencana Banjir Bengawan Solo)**

**Heru Indra Kiswanto**

**S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA ([heruindra4@gmail.com](mailto:heruindra4@gmail.com))**

**Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.**

**Abstrak**

Bojonegoro merupakan daerah yang tingkat kerawanan bencananya tinggi, karena hampir setiap wilayahnya rawan terjadi bencana. Bencana banjir bengawan solo merupakan bencana dengan tingkat kerugian tertinggi diantara jenis kebencanaan lain yang melanda Kabupaten Bojonegoro. Hal inilah yang mendorong pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Peraturan Daerah no 07 tahun 2012 tentang penanggulangan bencana. Dengan tujuan agar terselenggaranya penanggulangan bencana yang sistematis terpadu dan terkordinasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh diskripsi tentang implementasi peraturan daerah no 07 tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Penanggulangan Bencana Banjir Bengawan Solo)

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala beserta staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro dan masyarakat yang diambil dengan metode *Snowball Sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi,. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan perda tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro yang dilihat dari 6 variabel Van Matter dan Van Horn yaitu 1) ukuran dan tujuan kebijakan yang dicapai belum sesuai dengan target yang ditetapkan, karena penanggulangan bencana yang dilakukan hanya mampu menurunkan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana dan belum mampu menurunkan jumlah kejadian bencana 2) sumber daya manusia masih kurang, sedangkan keuangan maupun sumber daya waktu telah tercukupi, 3) karakteristik agen pelaksana baik pelaksana utama maupun pelaksana pendukung sudah mengerjakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing., 4) *disposition* BPBD Bojonegoro mendukung secara maksimal pelaksanaan Penanggulangan Bencana, 5) komunikasi antara organisasi sudah berjalan baik hanya saja komunikasi dengan masyarakat belum berjalan baik dan 6) lingkungan eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan adalah lingkungan ekonomi adanya aktivitas penambangan pasir ilegal di sepanjang aliran bengawan solo, lingkungan sosial keenganan masyarakat untuk dievakuasi dan lingkungan politik dukungan dari Bupati Bojonegoro serta anggota DPR Bojonegoro.

Saran yang dapat diberikan yaitu menambah jumlah petugas BPBD Bojonegoro, melakukan sosialisasi lebih lebih intensif, mengagendakan simulasi bencana secara rutin, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan, dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap aktivitas penambangan pasir ilegal.

Kata kunci : Implementasi, Penanggulangan Bencana

# **IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION Number 07/2012 DISTRICT BOJONEGORO ABOUT DISASTER MANAGEMENT (Case Study of Flood Disaster Bengawan Solo River)**

**Heru Indra Kiswanto**

**S1 Public Administration, FIS, UNESA ([Heruindra4@gmail.com](mailto:Heruindra4@gmail.com))**

**Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.**

## **Abstract**

Bojonegoro is an area that a high level of vulnerability to disaster, because almost every area are prone to disasters. Bengawan Solo flood disaster is a disaster with the highest damage level among other types of disaster in District Bojonegoro. This has prompted the local government of District Bojonegoro to publish Regional Regulation Number 07/2012 about disaster management. The purpose that implementation of disaster management held systematically, integrated and coordinated. The purpose of this study was to obtain a description of the implementation of regional regulations district Bojonegoro number 07/2012 about disaster management (Case Study of Flood Disaster Bengawan Solo River).

The approach used in this study is a qualitative approach. Subjects of this study consisted of the Head and staff of the Regional Disaster Management Agency District (BPBD) Bojonegoro and people are taken by the snowball sampling method. Data collection technique using qualitative research method that uses three different data collection techniques are semi-structured interviews, direct observation, and documentation. Data analysis was performed with data collection, data presentation, and conclusion.

The results showed the implementation of regional regulations about Disaster Management in Bojonegoro seen from the six variables Van Matter and Van Horn that are 1) the size and policy objectives are achieved not in accordance with the targets set, because disaster management is done only able to reduce losses caused by the disaster and has not been able to reduce the number of disaster, 2) human resources are still lacking, while the financial and time resources have been fulfilled, 3) characteristics of implementing agency both the main implementers as well as implementing support have the task in accordance with their respective duties, 4) disposition Regional Disaster Management Agency Bojonegoro to fully support the implementation of Disaster Management, 5) communication between the organization has been running well but communication with the public is not going well and 6) external environment affecting the implementation of the economic environment with the Illegal sand mining activities along the river flow Bengawan solo, social environment reluctance of people to be evacuated and political environment support from the Regent and member of People's Regional Representative Council (DPR) of District Bojonegoro.

Suggestions are given that increasing the number of officers Regional Disaster Management Agency District Bojonegoro socialize much more intensively, regularly scheduled disaster simulation, increase public awareness of the importance of the environment, and impose strict sanctions against the illegal sand mining activities.

**Keywords:** Implementation, Disaster Management

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Berdasarkan data dari BNPB di sepanjang tahun 2013 sampai bulan November 2013 terdapat 973 kejadian bencana (sumber: [infopublik.org](http://infopublik.org)).

Adanya dua musim di Indonesia juga menjadi sebuah persoalan bencana setiap tahunnya yakni banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau yang sampai saat ini belum ditemukan solusinya.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU Nomor 24 Tahun 2007). Pada setiap kejadian bencana pasti akan menimbulkan korban maupun kerugian materil karena dampak dari bencana alam tersebut, maka sangat penting untuk dilakukan tindakan penanggulangan bencana agar dapat meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana yang terjadi.

Dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2010-2014, kabupaten/kota yang memiliki resiko tinggi terhadap banjir menyebar di lima pulau besar Indonesia. Salah satunya pulau Jawa khususnya untuk Propinsi Jawa Timur terdapat 18 kabupaten/kota yang beresiko tinggi terhadap banjir seperti Sidoarjo, Lamongan, Jombang, dan Bojonegoro.

Keberadaan Sungai Bangawan Solo yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa juga menjadi salah satu faktor beberapa daerah di provinsi Jawa Timur termasuk dalam kawasan rawan bencana banjir. Khususnya untuk daerah-daerah yang berada disekitar yang dilalui oleh sungai bangawan solo tersebut. Salah satunya ialah Kabupaten Bojonegoro yang berada di sepanjang aliran sungai bangawan solo menjadikan Kabupaten yang berpotensi dan sering mengalami bencana banjir.

Melihat Topografi (fisik wilayah) Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran Sungai Bangawan Solo merupakan daerah daratan rendah (*floodplain area*) yang menyebabkan terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro. Hampir setiap tahun daerah Bojonegoro selalu dilanda banjir. Bencana banjir pada tahun 2007 yang merupakan banjir terparah sepanjang tahun di banding dengan daerah lain pada saat itu dimana kedalam air ada yang mencapai 3 meter dan banjir tersebut mengenai 114 desa yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro (sumber : [www.tempo.co](http://www.tempo.co)).

Selanjutnya, pada bulan Mei 2010, banjir menggengani 3.511 hektare tanaman padi, 176 hektare tegalan, serta 483 hektare tanaman palawija. Selain itu juga merendam pemukiman penduduk 94 desa dan kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan. Banjir juga menjebol tanggul Benagawan Solo sepanjang 51 meter yang berlokasi di Desa Ngulan, Kecamatan Dander, Desa Semanding,

Kecamatan Bojonegoro, dan Desa Kedungarum, Kecamatan Kanor. Banjir juga merusak 11 gedung Sekolah Dasar dan empat tempat ibadah. Kerugian yang disebabkan oleh banjir diperkirakan 27.3 milyar. Kerugian terbesar akibat kerusakan infrastruktur dan tanaman padi yang gagal panen setelah terendam selama tiga hari (sumber : [www.tempo.co](http://www.tempo.co)).

Terbaru banjir melanda Bojonegoro pada bulan Desember 2013 di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 126 desa yang tersebar di 14 kecamatan terendam banjir. Daerah yang tergenangi banjir berada di pinggir Sungai Bengawan Solo. Dari 14 kecamatan di Bojonegoro itu, di antaranya di Kecamatan Ngraho, Padangan, Kalitidu, Kasiman, Gayam, Malo, Trucuk, Dander, Kota Bojonegoro, Kapas, Kanor, Sumberejo dan Baureno (sumber : [www.tempo.co](http://www.tempo.co))

Bencana di Bojonegoro saat ini tidak hanya berjenis banjir saja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro mencatat bahwa ada 7 jenis kebencanaan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Diantaranya, banjir bandang, banjir Sungai Bengawan Solo, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, kekeringan dan dampak industri. Kabupaten Bojonegoro sebelah selatan, yakni mulai dari Kecamatan Kepohbaru sampai dengan Kecamatan Tambakrejo, Kecamatan Kedewan sampai dengan Kecamatan Kasiman sangat rentan sekali terjadi tanah longsor (sumber : [www.suarabanyuurip.com](http://www.suarabanyuurip.com)).

Diantara 7 jenis kebencanaan tersebut bencana banjir bangawan solo merupakan bencana dengan tingkat kerugian tertinggi. Hal ini berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro tahun 2013. Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2013**

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Jumlah Kerugian (Rp)
1	Banjir Bengawan Solo	7	65.180.542.500
2	Banjir Bandang	13	390.600.000
3	Tanah Longsor	19	167.000.000
4	Angin Kencang	38	942.565.000
5	Kebakaran	48	37.415.500.000
6	Kekeringan	16 kec/43 desa	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bencana Banjir Bengawan Solo merupakan bencana dengan tingkat kerugian tertinggi diantara bencana lain. Berdasarkan tabel tersebut juga diketahui Banjir Bengawan Solo memiliki jumlah kejadian bencana paling sedikit tapi jumlah kerugian paling banyak dibandingkan dengan bencana lain.

Melihat kerentanan daerah Bojonegoro akan bencana alam mengharuskan Pemerintah daerah juga ikut berperan dalam melindungi segenap masyarakatnya. Dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 11 Tahun 2010 Tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain Kabupaten Bojonegoro dengan diterbitkannya Perda tersebut pemerintah resmi membentuk BPBD Bojonegoro. Mengingat pentingnya penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, tentu belum cukup apabila hanya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kelembagaan Penanggulangan bencana maka pada tahun 2012 diterbitkanlah Peraturan Daerah No 7 tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro Tentang Penanggulangan Bencana.

Diterbitkannya Perda No 07 tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro tentang penanggulangan bencana tidak hanya bertujuan untuk terlaksananya penanggulangan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Adapun tujuan dari diterbitkannya Perda Kabupaten Bojonegoro No 07 tahun 2012 tentang penanggulangan bencana yang terdapat pada pasal 2 adalah sebagai berikut:

#### Pasal 2

(3) Tujuan Penanggulangan bencana dalam Peraturan Daerah ini untuk:

- a. Mengurangi potensi terjadinya bencana
- b. Meminimalisir terjadinya jumlah korban dampak bencana;
- c. Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. Memelihara keamanan, kelestarian dan keharmonisan lingkungan
- e. Mewujudkan partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam upaya penanggulangan bencana

f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penanggulangan Bencana masih belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan, karena berdasarkan pengamatan penulis pemerintah masih lambat dalam menangani sebuah bencana yang terjadi dan juga dalam pemberian bantuan kepada korban masih kurang. Hal ini seperti disampaikan oleh ibu Siti selaku masyarakat Bojonegoro sebagai berikut:

“pemerintah itu lambat mas kalau memberi bantuan pernah banjir sudah sehari baru ada petugas yang membantu, selain itu juga bantuan yang diberikan kadang masih kurang mas”(wawancara 15 februari 2014)

maka dari pemerintah bojonegoro sepatutnya lebih cepat tanggap terhadap bencana yang terjadi.

Permasalahan bencana yang terjadi bukan hanya itu saja, seperti yang penulis lihat dilapangan banyak masyarakat yang tidak mengerti prosedur pelaporan bencana dan cenderung menunggu orang yang mengerti tentang prosedur pelaporan bencana yang nantinya akan melaporkan kejadian bencana tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Ali selaku masyarakat Bojonegoro sebagai berikut:

“kalau untuk masalah pelaporan(bencana) saya sendiri tidak tahu mas jadi kalau ada bencana biar orang yang tahu aja yang melakukannya (melaporkan bencana) kalau saya membantu (menangani bencana) saja.” (wawancara 15 februari 2014)

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Pada Penanggulangan Bencana Banjir Bengawan Solo)”

Selanjutnya Penelitian dengan judul tersebut akan dianalisis dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn yang ditinjau dari segi ukuran dan tujuan kebijakannya, sumber dayanya (manusia, dana dan waktunya), karakteristik agen pelaksanaannya, sikap dari para pelaksanaannya, komunikasinya, dan lingkungan-lingkungan yang berpengaruh yaitu sosial, politik dan ekonomi. Teori Model Implementasi ini digunakan karena dianggap model yang paling lengkap dan tepat

untuk menganalisis implementasi peraturan daerah penanggulangan bencana.

Melalui penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi baru khususnya dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana, selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam perbaikan kebijakan penanggulangan bencana dan memberikan gambaran kepada masyarakat terkait upaya pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### 1. Definisi Implementasi Kebijakan

Salah satu tahap dalam siklus kebijakan adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar tentang penjabaran keputusan politik melalui prosedur rutin yang dilaksanakan melalui birokrasi, melainkan juga menyangkut mengenai masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle:1980). Oleh sebab itu implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dari seluruh proses kebijakan. Dalam Wahab (2002:65), Pressman dan Widavsky menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata kebijakan. Van Meter dan Van Horn merumuskan bahwa implementasi kebijakan, sebagai:

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”

### 2. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu: unsur pelaksana, adanya program yang dijalankan, dan kelompok sasaran. Unsur pelaksana dalam kebijakan ini adalah BPBD Kabupaten Bojonegoro. Program yang dijalankan adalah Penanggulangan Bencana dan kelompok sasarannya ialah seluruh masyarakat Bojonegoro.

### 3. Model-model Implementasi

Model yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan A Model Of The Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan

berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. (Agustino:2008).

Ada enam variabel, menurut Van Matter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik adalah:

#### a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-jika-hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

#### b. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, yaitu sumberdaya financial dan sumberdaya waktu. Karena ketika sumberdaya manusia yang kompeten telah tersedia tetapi dana dalam anggaran tidak tersedia maka akan menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan tujuan kebijakan publik. Demikian pula dengan sumber daya waktu, saat sumber daya giat bekerja dan dana menunjang dengan baik tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka ini dapat menjadi bagian ketidak berhasilan kebijakan publik.

- c. **Karakteristik agen pelaksana**  
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
- d. **Sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana**  
Sikap penerimaan atau penolakan dari (Agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan, tetapi kebijakan yang akan diimplementasikan oleh implementator adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin tidak para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
- e. **Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana**  
Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu sebaliknya.
- f. **Lingkungan ekonomi, sosial dan politik**  
Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mending

keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

## METODE

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010:40). Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada rasional yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal yang terjangkau oleh penalaran manusia, empiris yaitu cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan, serta yang terakhir adalah sistematis dimana proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Metode penelitian ini meliputi Pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi penelitian, Fokus Penelitian, Subjek Penelitian, Jenis dan Sumber data, Instrumen penelitian, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat hasil penelitian yang telah di dapat, maka dapat dilakukan analisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 07 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana dengan menggunakan teori Van Metter dan Van Horn untuk mengetahui pelaksanaan program yang ada. Teori milik Van Metter dan Van Horn ini mencakup enam variabel, diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini sangat sesuai untuk menganalisis data yang sudah didapat dalam penelitian ini. sehubungan dengan hal ini, maka peneliti berusaha menganalisis berdasarkan variabel yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn sebagai berikut:

### a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pelaksanaan peraturan daerah tentang Penanggulangan Bencana memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari bencana dengan melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinasi, sistematis dan

menyeluruh. Penanggulangan Bencana secara menyeluruh ialah seluruh upaya Penanggulangan mulai dari Pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

Pelaksanaan penanggulangan bencana sebenarnya sudah terlaksana secara menyeluruh, tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Khususnya pada tahap pra bencana. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti sistem kebencanaan yang ada di Bojonegoro. Bukti lain yang menunjukkan pelaksanaan pra bencana belum maksimal ialah adanya peningkatan kejadian bencana dari tahun 2013 sebanyak 163 kejadian bencana di tahun 2014 meningkat menjadi 233 kejadian bencana yang seharusnya jumlah kejadian bencana ini bisa ditekan jika pelaksanaan pra bencana tepat dan maksimal. Melihat permasalahan tersebut sebenarnya BPBD Bojonegoro sedang berusaha semaksimal mungkin mencari solusi terbaik. Melihat masih belum tercapainya seluruh tujuan yang telah ditetapkan. Maka dapat dikatakan tujuan Perda penanggulangan bencana belum tercapai

Pada pencapaian tujuan perda tentang penanggulangan bencana, pelaksanaan perda penanggulangan bencana di Kabupaten Bojonegoro belum bisa dikatakan sepenuhnya berhasil, karena belum tercapainya target yang diharapkan. Target yang ditetapkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana ialah penurunan dampak oleh bencana setiap tahunnya. Berdasarkan data yang ada menunjukkan adanya peningkatan kejadian bencana tiap tahunnya namun kerugian yang diakibatkan oleh bencana mengalami penurunan secara signifikan dimana kerugian oleh bencana di tahun 2013 sebesar 104.096.207.500 menjadi 10.303.627.500 di tahun 2014, seharusnya pelaksanaan penanggulangan bencana bisa menurunkan jumlah kejadian bencana dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana.

## **b. Sumber Daya**

Sumberdaya yang tersedia untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro antara lain adalah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu

### **1) Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena sumber daya

manusia merupakan penggerak dari sebuah kebijakan yang ada. Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan sebuah kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Kebijakan akan berhasil jika kebijakan tersebut telah didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten pada bidangnya dan mencukupi, begitupun sebaliknya pelaksanaan kebijakan akan mengalami kegagalan jika sumber daya manusia yang ada tidak kompeten pada bidangnya dan jumlah sumber daya manusia yang ada tidak memadai.

Sumber daya manusia yang menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 07 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro. BPBD Bojonegoro dalam pelaksanaan penanggulangan bencana membentuk tim reaksi cepat yang beranggotakan 22 orang. Tim reaksi cepat inilah yang menjadi pelaksana kegiatan penanggulangan bencana. Terkait sumber daya manusia yang melaksanakan Perda Penanggulangan Bencana yaitu tim reaksi cepat sudah didukung oleh para petugas yang profesional dan kompeten pada bidangnya. Akan tetapi dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis sumber daya manusia masih memiliki kendala terkait jumlah petugas yang kurang, terlebih untuk penanggulangan bencana banjir, karena wilayah terdampak sangat luas sedangkan petugas yang ada sedikit.

### **2) Sumber daya keuangan**

Sumber daya keuangan menyangkut pengalokasian dana dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Pada pelaksanaan sebuah kebijakan sumber daya keuangan sangat penting, walaupun sebuah kebijakan sudah didukung dengan sumber daya manusia yang baik tapi dana yang ada tidak mencukupi maka kebijakan tersebut takkan terlaksana secara maksimal.

Sumber daya keuangan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana berasal dari APBD Bojonegoro dan bantuan dari pihak luar seperti bantuan dari BNPB, bantuan dari BUMN maupun perusahaan swasta dan masyarakat. Dimana dana APBD digunakan untuk kegiatan

operasional dan kebencanaan sedangkan dana bantuan dari pihak luar dihususkan untuk kebencanaan saja.

3) Sumber daya waktu

Sumber daya waktu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana ialah tentang ketersediaan waktu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Van Matter dan Van Horn menyatakan bahwa walaupun sumber daya manusia terpenuhi dan giat bekerja, serta sumber daya keuangan berjalan dengan baik tetapi apabila terbentur oleh persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun akan menjadi penyebab bagian dari ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya waktu dalam Penanggulangan bencana fleksibel. Fleksibel disini ialah tidak ada waktu dan durasi yang pasti dalam pelaksanaan penanggulangan bencana karena waktu pelaksanaannya mengikuti kejadian bencana yang ada dalam hal ini laporan dari masyarakat dan durasinya ditentukan oleh besar kecilnya bencana yang ada.

**c. Karakteristik Agen Pelaksana**

Keberhasilan yang dapat dicapai dalam menjalankan sebuah kebijakan tidak lepas dari karakteristik yang dimiliki oleh badan pelaksana kebijakan. Badan pelaksana disini dapat meliputi organisasi formal dan organisasi informal. Agustino (2008) menyatakan bahwa pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan.

Pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 07 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana badan pelaksana yang terlibat meliputi BPBD Bojonegoro, SKPD Kabupaten Bojonegoro, TNI dan Polri. Masing-masing dari agen pelaksana tersebut memiliki tugas-tugas dan spesialisasi tertentu. BPBD Bojonegoro sebagai pelaksana utama dalam pelaksanaan Penanggulangan bencana mempunyai tugas menentukan prosedur penanggulangan bencana, mengendalikan pengumpulan serta penyaluran bantuan, dan melakukan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana BPBD dapat melibatkan SKPD lain. Dimana tugas dari SKPD yang terlibat mengikuti dari karakteristik SKPD tersebut. Seperti dinas kesehatan bertugas menyediakan layanan kesehatan

di lokasi bencana, dinas sosial memberikan bantuan sosial kepada korban bencana, dinas pekerjaan umum bertugas membantu dalam penambalan maupun pembuatan tanggul penahan banjir. Sementara TNI dan Polri bertugas untuk menjaga lokasi bencana dan membantu dalam proses SAR

**d. Sikap/kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana**

Sikap para pelaksana ialah terkait sikap penerimaan atau penolakan dari (Agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Variabel ini membahas mengenai bagaimana sebenarnya respon yang diberikan para pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan. Menurut Widodo (2007:105) Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan antara lain terdiri atas pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan, apakah arah respon implementator pada kebijakan yang dilaksanakan menerima atau menolak

Sikap dari pelaksana Perda Penanggulangan bencana dapat dikatakan cukup baik. Dilihat dari para pegawai yang selalu siaga agar ketika ada bencana bisa langsung ditindaklanjuti. Selain itu juga semua pegawai BPBD sudah paham tentang tugasnya masing-masing karena pegawai yang ada merupakan orang yang kompeten.

**e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Dalam variabel Komunikasi ini yang dimaksud komunikasi ialah cara penyampaian pesan atau informasi kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan agar setiap pihak yang terlibat dapat mengerti apa yang akan mereka kerjakan. Semakin baik komunikasi yang telah terjalin antara semua pihak maka akan memperkecil kesalahan yang akan terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan komunikasi yang ada antara BPBD dengan pihak-pihak yang terkait sudah bagus. Hal ini karena inisiatif dari BPBD dengan mengagendakan rapat koordinasi dan konsultasi tiap tahunnya. Dengan adanya rapat ini misal komunikasi antar pihak bisa dihindari dan permasalahan kebencanaan dapat diselesaikan bersama. Akan tetapi komunikasi yang terjalin antara BPBD dan masyarakat penulis anggap kurang maksimal. Hal ini karena cara sosialisasi yang ada tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dimana perwakilan dari desa yang telah diberi pelatihan dalam bentuk seminar kebencanaan oleh BPBD seharusnya menyampaikan hasil



latihannya kepada masyarakat ternyata tidak melakukannya. Sebagai buktinya ialah pengakuan dari masyarakat yang tidak pernah mendapat sosialisasi tentang kebencanaan, selain itu juga penulis merasa sosialisasi yang dilakukan BPBD minim karena hanya melakukan sosialisasi berupa pelatihan tanpa ada sosialisasi dalam bentuk lain seperti lewat spanduk dan banner terkait Perda penanggulangan bencana.

#### **f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Kondisi sosial, politik dan ekonomi merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan dimana lingkungan sosial, politik dan ekonomi bisa menghambat ataupun mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana.

##### **1) Lingkungan ekonomi**

Lingkungan ekonomi di beberapa titik aliran Sungai Bengawan Solo yang perekonomiannya bergantung pada aktivitas penambangan pasir. Sebenarnya aktivitas penambangan pasir yang dilakukan dapat membuat daerah tersebut menjadi rawan bencana banjir dan meningkatkan potensi bencana, sedangkan adanya Perda penanggulangan bencana bertujuan untuk meminimalisir potensi bencana di Kabupaten Bojonegoro sehingga aktivitas penambangan pasir menjadi penghapas dalam usaha meminimalisir potensi bencana. Aktivitas penambangan pasir yang dimaksud disini ialah penambangan pasir mekanik. Walaupun dilarang penambangan secara mekanik ini masih dilakukan karena penambangan secara mekanik mendapatkan hasil yang banyak dibandingkan penambangan pasir tradisional.

##### **2) Lingkungan sosial**

Dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana lingkungan sosial kendala sosial yang dialami ialah banyaknya masyarakat yang menolak untuk dievakuasi karena mengkhawatirkan rumah maupun barang-barangnya jika ditinggal mengungsi, hal ini menyebabkan pendataan kebutuhan korban dan penyaluran bantuan serta bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan turut menjadi kendala dalam pelaksanaan penanggulangan bencana ini ditandai dengan masih adanya

aktivitas penambangan pasir ilegal yang berpotensi meningkatkan kerawanan bencana pada daerah tersebut.

##### **3) Lingkungan politik**

Lingkungan politik disini ialah pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Bupati) mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana bentuk dukungan yang diberikan oleh Bupati Bojonegoro ialah dengan melihat langsung bagaimana pelaksanaan Penanggulangan Bencana. Dukungan yang ada dalam pelaksanaan penanggulangan bencana bukan hanya dari Bupati Bojonegoro tetapi juga dari para anggota DPR Bojonegoro dukungan yang diberikan dalam bentuk mengundang BPBD Bojonegoro untuk membahas kebencanaan di Kabupaten Bojonegoro, selain itu dukungan dari anggota DPR juga dikarenakan beberapa anggota DPR dapilnya merupakan wilayah rawan bencana.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan dalam hasil dan pembahasan mengenai Peraturan Daerah No 07 Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro yang dianalisis melalui teori yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn terdapat enam indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan

Indikator ukuran dan tujuan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bencana dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh. Pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bojonegoro memang sudah dilaksanakan secara menyeluruh hanya saja pelaksanaannya belum maksimal karena masih terdapat permasalahan terkait sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD Bojonegoro dan sifat masyarakat yang enggan mengungsi. Pada pencapaian target pelaksanaan penanggulangan bencana belum memenuhi target yang diinginkan. Target yang ingin dicapai adalah penurunan dampak yang disebabkan oleh bencana tiap tahunnya. Berdasarkan data yang ada penurunan hanya terjadi pada angka kerugian yang

ditimbulkan oleh bencana sedangkan untuk kejadian bencana mengalami peningkatan tiap tahunnya yang semula 163 kejadian bencana ditahun 2013 meningkat menjadi 233 kejadian di tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan Perda penanggulangan bencana masih belum sepenuhnya berhasil.

Indikator sumber daya meliputi Sumber daya manusia, keuangan dan waktu. Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro sumber daya manusia yang ada sudah didukung oleh petugas yang kompeten dan professional, tetapi untuk sumber daya manusia masih terdapat permasalahan terkait jumlah petugas yang masih kurang khususnya untuk penanggulangan banjir dimana petugas yang ada tidak bisa menangani seluruh wilayah yang terdampak banjir.

Sumber daya keuangan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana telah didukung oleh dana yang cukup dimana dana yang ada berasal dari APBD kabupaten Bojonegoro dan bantuan dari pihak luar seperti bantuan dari pemerintah pusat, bantuan dari pemerintah provinsi dan perusahaan (BUMN, perusahaan swasta) maupun masyarakat. Terkait dalam penggunaan dana yang ada dana dari APBD Kabupaten Bojonegoro digunakan untuk pembiayaan operasional BPBD Bojonegoro dan kegiatan kebencanaan sedangkan dana dari bantuan pihak luar digunakan untuk kegiatan kebencanaan saja.

Sumber daya waktu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana *fleksible* karena mengikuti kejadian bencana yang terjadi baik itu pelaksanaannya maupun durasi waktu yang digunakan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada dalam pelaksanaan Perda penanggulangan bencana sudah cukup bagus karena permasalahan yang ada hanya untuk jumlah petugas dan terjadi pada penanggulangan bencana banjir.

Indikator selanjutnya ialah Karakteristik agen pelaksana. Agen pelaksana yang melaksanakan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro adalah BPBD kabupaten bojonegoro dan dalam pelaksanaan kegiatannya BPBD Bojonegoro dapat meminta pembantuan dari SKPD lain. Pada pelaksanaan penanggulangan bencana BPBD Bojonegoro sudah menjalankan sesuai dengan spesialisasi tugas yang telah diberikan, sedangkan dalam hal perbantuan dari SKPD lain juga sudah cukup ideal karena perbantuan yang diberikan berdasarkan karakteristik setiap SKPD

Sikap (*disposition*) para pelaksana, terkait sikap para agen pelaksana Pelaksanaan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro yaitu BPBD Bojonegoro mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana. Hal ini dilihat dari petugas yang selalu siap ketika terjadi bencana. Selain itu juga para petugas juga paham betul tugas dan fungsinya.

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik, karena setiap tahunnya BPBD Bojonegoro selalu mengadakan rapat konsultasi dan kordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat. Sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penaggulangan bencana sudah mengerti dengan tugas dan fungsinya ketika terjadi bencana. Sedangkan sosialisai yang dilakukan oleh BPBD Bojonegoro masih kurang maksimal. Karena bentuk sosialisasi yang dilakukan hanya pelatihan saja tanpa ada sosialisasi dalam bentuk lain.

Indikator terakhir yang dikemukakan oleh van metter hor ialah lingkungan. Lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro, terdapat lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Lingkungan ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan bencana ialah aktivitas penambangan pasir ilegal yang menggunakan diesel sepanjang aliran sungai bengawan solo. Sehingga membuat daerah sekitar penambangan menjadi rawan bencana terutama bencana tanah longsor.

Lingkungan sosial yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan bencana ialah banyaknya masyarakat yang kurang percaya dengan keamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Sehingga menolak untuk dievakuasi saat terjadi bencana dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih rendah. Lingkungan politik yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan bencana ialah dukungan dari Bupati Bojonegoro dan anggota DPR bojonegoro terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana.

## Saran

Dari hasil pemaparan mengenai implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. Menambah agen pelaksana Penanggulangan bencana agar ketika terjadi bencana wilayah yang ditangani semakin luas.
  2. Melakukan sosialisasi lebih intensif agar masyarakat paham betul tentang kebijakan yang ada. Selain itu juga menambahkan bentuk sosialisasi lain seperti reklame, media massa, dan melakukan sosialisasi secara lisan di setiap kesempatan. Berdasarkan yang penulis temukan di lapangan banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang system kebencanaan yang ada dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh pelaksana kebijakan berjalan kurang maksimal dan jenis sosialisasi yang dilakukan juga tidak bervariasi.
  3. Mengadakan simulasi kejadian bencana alam secara rutin dengan melibatkan lembaga pendidikan mulai dari SD sampai SMA, masyarakat, organisasi masyarakat, PKK dan LINMAS. Adanya simulasi bencana yang dilakukan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dalam menghadapi bencana dan lebih partisipatif dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
  4. Berkordinasi dengan Badan Konserfasi sumberdaya Alam (BKSDA) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap aktivitas panambahan pasir ilegal.
- Moelong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (EdisiRevisi). Bandung:PT. RemajaRosdakarya
- Nugroho, Riant. 2003. *KebijakanPublik: Perumusan, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sarwoto, Jonathan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung :Alfabeta
- Widodo,Joko 2007, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing
- Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana kabupaten Bojonegoro
- Undang-undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Rencana Nasional (RENAS) Penanggulangan Bencana 2010-2014
- <http://infopublik.org/read/63473/kejadian-bencana-2013-turun-drastis-jumlah-korban-meningkat.html>
- [www.tempo.co/read/news/2007/12/30/058114460/Banjir-Bojonegoro-Banjir-Terb Besar-Tahun-Ini](http://www.tempo.co/read/news/2007/12/30/058114460/Banjir-Bojonegoro-Banjir-Terb Besar-Tahun-Ini)
- [www.tempo.co/read/news/2010/05/24/180250089/Kerugian-Akibat-Banjir-Bojonegoro-Mencapai-Rp-273-Miliar](http://www.tempo.co/read/news/2010/05/24/180250089/Kerugian-Akibat-Banjir-Bojonegoro-Mencapai-Rp-273-Miliar)
- [www.tempo.co/read/news/2013/12/16/058537837/Bojonegoro-dan-Tuban-Terendam-Banjir-Bengawan-Solo](http://www.tempo.co/read/news/2013/12/16/058537837/Bojonegoro-dan-Tuban-Terendam-Banjir-Bengawan-Solo)
- [www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/7-tren-bencana-alam-di-Bojonegoro](http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/7-tren-bencana-alam-di-Bojonegoro)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2002, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, BumiAksara.
- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung; Alfabeta
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Dunn, William, 2000, *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moelong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (EdisiRevisi). Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Moelong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (EdisiRevisi). Bandung: PT. RemajaRosdakarya.